



MENGEMBALIKAN DEMOKRASI KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA

PERNYATAAN BERSAMA GURU BESAR UNIVERSITAS GADJAH MADA

Menyikapi situasi politik nasional yang berubah begitu cepat akhir-akhir ini, seluruh bangsa Indonesia patut prihatin karena begitu banyak perkembangan yang semakin mengarah kepada kemunduran demokrasi di Indonesia. Ketegangan yang terjadi diantara para elit politik diantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif memperlihatkan bahwa semangat para pemimpin politik lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dan diri-sendiri ketimbang kepentingan rakyat dan warga Indonesia pada umumnya yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpastian global.

Terbitnya Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang kemudian ditanggapi secara reaktif oleh Badan Legislatif DPR yang hendak mengubah Undang-undang tentang Pilkada menunjukkan betapa instrumen perundangan sudah dijadikan sebagai alat untuk mengejar kepentingan politik sempit dan jangka-pendek, seraya mengabaikan keinginan rakyat bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat di tanah-air.

Menyikapi situasi darurat ini, kami para Gurubesar Universitas Gadjah Mada menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada semua pemimpin lembaga negara agar mendengar suara rakyat yang telah disampaikan melalui imbauan, seruan, demonstrasi, dan unjuk-rasa yang saat ini dilakukan oleh banyak unsur masyarakat, yang pada intinya agar mencegah manipulasi dan kekerasan politik yang melanggengkan kekuasaan.
2. Menolak berbagai bentuk praktik pemilihan pemimpin di tingkat nasional dan daerah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
3. Menolak penggunaan instrumen politik yang menggunakan intimidasi, pengerahan aparat negara, penyebaran uang dan material, dan cara-cara tidak terpuji lainnya yang mencederai berjalannya proses demokrasi yang beradab.
4. Mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil.
5. Mendorong para wakil rakyat di DPR untuk tidak menggunakan legitimasi palsu melalui proses pembuatan peraturan perundangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat dan kedaulatan rakyat.
6. Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada dengan berpegang teguh pada kesepakatan konstitusional, termasuk diantaranya Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

7. Mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia, dengan menyampaikan seruan-seruan yang tetap memelihara keadaban serta mencegah tindakan kekerasan yang justru mencederai proses demokratisasi yang telah berjalan.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada:

1. Prof. Dr. M. Baiquni, MA
2. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
3. Prof. Dr. Masyhuri, MSc
4. Prof. Dr. Lasiyo, MM
5. Prof. Dr. Koentjoro, MA
6. Prof. Dr. Madarina Julia, MSc
7. Prof. Dr. Endang Semiarti, MSc
8. Prof. Dr. Ambar Pertiwiningrum, MSc
9. Prof. Dr. Catur Sugiyanto, MSc
10. Prof. Dr. Bambang Riyanto, MEc
11. Prof. Dr. Ir. Tri Wibowo, MSc
12. Prof. Dr. Wiendu Nuryanti, MSc
13. Prof. Dr. Ahmad Kharis Nugroho, MSc
14. Prof. Dr. Tri Murti Andayani, MSc
15. Prof. Dr. Budi Yuli Setianto, SpKJ
16. Prof. Dr. dr. Sri Suryawati, Apt.
17. Prof. Dr. Suryo Hadi Winoto, MSc
18. Prof. Dr. Ir. Ali Agus, MSc
19. Prof. Dr. Faruk, MA
20. Prof. Dr. Fadlil Munawar Manshur, MA
21. Prof. Dr. Alvin Fadila Helmi, MSc
- 22.

(Per pukul 16.00 WIB, Rabu tgl 22 Agustus 2024 dan masih akan terus bertambah)